KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Penjaminan APBN Rusak Reputasi RI
Tanggal : Kamis, 21 September 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Penjaminan APBN Rusak Reputasi RI

POLEMIK soal terbitnya aturan mengenai penjaminan APBN atas utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berlanjut. Selain memunculkan risiko besar dan memengaruhi perekonomian, langkah pemerintah itu juga dinilai bakal merusak reputasi dan peringkat utang Indonesia di level global.

"Kemudian pada gilirannya akan memengaruhi tingkat suku bunga pinjaman Surat Berharga Negara (SBN) yang sudah tinggi. Niat pemerintah itu juga akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat," tutur anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, kemarin.

Menurut Amin, semestinya pemerintah konsisten dengan rencana awal yakni tidak menyentuh sama sekali anggaran negara. Proyek kereta cepat juga harus tetap dilaksanakan dengan skema *business to business*. "APBN seharusnya merupakan entitas yang terpisah dari urusan tersebut," terang Amin.

Ia juga menyoroti masalah bertambah besarnya beban keuangan negara akibat ambisi memindahkan ibu kota negara dengan membangun IKN Nusantara. Kendati porsi pembiayaan dari APBN atas proyek itu hanya berkisar 20%, Amin menilai pemerintah sudah gagal menentukan skala prioritas sebab utang negara terus bertambah tiap tahun.

Dari catatan Amin, level utang Indonesia saat ini berkisar di Rp7.000 triliun dan berpotensi naik menjadi Rp10 ribu triliun di 2024. "Beban utang itu sudah cukup besar untuk dipikul. Oleh karena itu, membangun ibu kota baru bukanlah prioritas yang tepat," pungkas Amin.

Associate Professor Nanyang Technological University Singapura, Sulfikar Amir, menilai pemerintah telah tunduk kepada entitas bisnis asing dalam kasus KCJB. "Bisa dibayangkan, ada satu negara memberi utang dan meminta negara yang diberi utang memberikan jaminan dari anggarannya. Kita bicara kedaulatan negara dalam mengelola pembiayaan dan belanja. Artinya ada pendiktean di sana, dan secara politis itu sangat berisiko," ujarnya.

Sulfikar mendorong pemerintahan berikutnya melakukan audit objektif dan independen untuk proyek KCJB. Tujuannya mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab atas karut-marutnya proyek tersebut. Di saat yang sama, bila memungkinkan, penjaminan APBN dibatalkan dan dicari skema yang lebih minim risiko.

Terpisah, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut besaran suku bunga pinjaman pembengkakan biaya proyek KJCB yang bakal disepakati Indonesia dan Tiongkok sebesar 3% atau lebih rendah daripada tawaran awal yang diminta Tiongkok di level 4%.

Total pembengkakan biaya yang disepakati sebesar US$1,2 miliar atau setara Rp18,4 triliun (kurs Rp15.355). Indonesia harus menanggung utang sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,2 triliun. Dana itu akan dibayarkan Indonesia melalui pinjaman dari China Development Bank. (Mir/Ins/X-6)